

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN II

BINMAS – SEKSI KEWASPADAAN DINI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan II ini yang berjudul “Laporan Triwulan II Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi T.A 2026” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi di bidang Pembinaan Masyarakat selama Triwulan II. Laporan Triwulan disusun sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan Triwulan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,



IMAM ASROPI, SKM, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19710913 199403 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan	4
1.4 Anggaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN.....	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	58
BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN.....	59
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	59
3.2 Kendala dan Solusi.....	60
BAB IV PENUTUP.....	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan II Tahun 2026 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :
- 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
 - 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

1.4 Anggaran

Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 173.920.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	173.920.700,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan II (April - Juni) Tahun Anggaran 2026, yaitu :

A. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Ganggguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Aksi Unjuk Rasa dari Elemen Masyarakat, Berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 535 / SATPOL.PP tanggal 2 April 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa BEM-SI di Taman degulis Untan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 2 April 2026 di mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Taman Degulis Untan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Koalisi Rakyat Melawan (KORAMEL) pada Kamis (2/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi tersebut berlangsung di Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Aksi unjuk rasa dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Sdr. Syarif Hidayatullah dari Korpus FKBK, dan diikuti oleh kurang lebih 70 orang peserta. Massa aksi berasal dari berbagai elemen organisasi, di antaranya Solmadapar, BEM SI Kalbar, FKBK, BEM UNU, FOMDA Kalbar, Kamisan, BEM OSO, BEM UPGRI, BEM Polnep, serta BEM UMP.

Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mahasiswa mengutuk keras dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus yang merupakan seorang aktivis HAM. Kedua, massa menuntut agar

pelaku diproses secara hukum secara transparan, adil, dan akuntabel tanpa adanya perlindungan maupun intervensi dari pihak manapun. Ketiga, mahasiswa mendesak negara untuk menegakkan keadilan serta menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara, khususnya para aktivis. Pengamanan kegiatan dipimpin oleh Kabagops Polresta Pontianak Kopol Joko Sutriyatno, S.H. Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan atas perintah Kapolresta Pontianak Kombes Pol endang Tri Purwanto, S.I.K.M.Si. melalui Kabagops Polresta Pontianak guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Demikian dilaporkan Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa BEM-SI d Taman Degulis Untan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Selama pelaksanaan aksi, situasi terpantau aman dan terkendali dengan pengawasan aparat kepolisian di lokasi kegiatan.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 547 / SATPOL. tanggal 6 April 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak Di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 6 April 2026 di mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Halaman Gedung DPRD Prvinsi Kalimantan Barat.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

3. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Koordinator Lapangan Ya Heryanto, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Pada Kegiatan Kegiatan Unjuk Rasa Aksi Solmadapar Di Halaman Kantor Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin, 6 April 2026, sekitar pukul 16.50 WIB di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Aksi tersebut mengusung tema “Aksi Reformasi Mati di Tangan Aparat” dan digelar oleh elemen massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura. Kegiatan ini dikoordinatori oleh Pangestu Wiguna dan diikuti sekitar 70 peserta. Dalam orasinya, massa

menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya kritik terhadap peran aparat dalam penegakan hukum. Salah satu poin yang disuarakan adalah terkait profesi tentara yang dinilai sebagai profesi mulia, namun dipersalahkan ketika dianggap menjalankan perintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalbar, yakni Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Prabasa Anantatur, Ketua Komisi I dari Fraksi Demokrat, Rasmidi, serta Sekretaris Komisi I dari Fraksi PAN, Zulfidar Zaidar Mochtar. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif hingga selesai pada pukul 18.25 WIB. Aparat kepolisian yang dipimpin langsung Wakapolresta Pontianak melakukan pengamanan secara humanis sehingga kegiatan berjalan aman dan lancar.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 615 / SATPOL.PP tanggal 16 April 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmadapar Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 17 April 2026 di mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Halaman Kantor Gubernur Prvinsi Kalimantan Barat.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat

3. Kegiatan

Kegiatan Unjuk Rasa Aksi Solmadapar Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Pukul 09:15 Masa dari solmadapar melakukan aksi lanjutan pada hari kamis berkumpul di tikum digulis untan, aksi dilanjutkan dengan longmarch menuju kantor gubernur. Masa tiba di pintu gerbang masuk kantor gubernur pukul 09:45 orasi dilakukan di depan gerbang pintu masuk dan dilanjutkan dengan aksi pembakaran ban

- masa menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait lamban nya penanganan aksi teror di daerah air upas

- masa menuntut perlindungan terhadap aksi teror yg terjadi di air upas yg berdasarkan data sudah lebih dari 30 pondok rumah warga dibakar oleh orang tidak dikenal

- masa menyoroti terhadap kinerja aparat penegak hukum yg membedakan penanganan kasus dimana kasus pembakaran pondok warga dinilai dibiarkan berbeda dengan kasus2 lain

Pukul 10.15 masa diijinkan masuk dengan meninggalkan ban di pos penjagaan audiensi dilanjutkan di depan kantor gubernur ditemui oleh

- Asisten 1 Bapak Antonius Rawing

- Paw Gerindra Komisi V Ibu Rosmidi

Didampingi oleh Kasatpol PP

Kabid KUK dan Kapolsek Pontianak Selatan Ibu Inayatun Nurhasanah

Masa menyatakan kasus yg terjadi di air upas sudah berjalan 1 tahun lebih dimana laporan sudah dilakukan namun kejadian berulang terus terjadi hingga 30 lebih pondok rumah warga terbakar tanpa ada perlindungan hukum oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum, masa meminta gubernur utk mengambil tindakan terhadap aksi teror pembakaran pondok rumah warga dimana laporan sudah berjalan 1 tahun 2 bulan namun kejadian pembakaran masih berulang terjadi bahkan berdasarkan data sudah terjadi 33 kasus. Dalam peristiwa ini polsek setempat dan pemerintah dianggap mengabaikan keamanan keselamatan serta berkesan melakukan pembiaran terhadap kejadian tsb oleh karena itu masa meminta gubernur utk memberi perhatian lebih atau mengambil aksi cepat dan tegas dengan kordinasi bersama Kapolda dan Pangdam dalam menyelesaikan kasus yg terjadi,

Tanggapan,

- Bapak Antonius Rawing menyatakan akan mengkordinasikan dengan forkopimda utk meminta bantuan Kapolda bekerja sama dengan Panglima utk menyurati atau mengambil tindakan dengan maksud memberikan perlindungan lebih lanjut atau bantuan ke polres ketapang

- Ibu Rosmidi menyatakan per tgl 1 april dilantik beliau juga menyimak terkait kasus pembakaran atau terorisme di air upas dalam hal ini ranah nya berada di komisi 1 oleh Bapak Rasmidi dalam penanganannya

meminta utk pelimpahan kasus ke Polda apabila polres setempat tidak bisa menangani kasus atau memberikan perlindungan dimana data dilapangan sudah terjadi 30 kebakaran pondok rumah warga

Pukul 13:30 orasi ulang masa mengkritik terhadap aksi yg sudah berlangsung 3x belum ditemui oleh Gubernur, dalam simpulannya masa menyatakan bahwa Gubernur dalam hal ini mati fungsi

Masa meninggalkan kantor gubernur dengan tertib tanpa adanya gangguan trantibum.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 675 / SATPOL.PP tanggal 24 April 2026, Melakukan Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Fomda Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa “Kalbar Darurat” di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara Aksi tersebut diikuti sekitar 35 (tiga puluh lima) massa yang berasal dari FOMDA Kalbar dan Himapon. Kegiatan dipimpin oleh Sekjen Solmadapar, Asep, dengan koordinator lapangan Syarif Falmuriandi Tri Saris.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka menyoroti kasus yang terjadi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, serta berbagai peristiwa sepanjang tahun ini yang disebut telah mencapai kurang lebih 37 insiden teror. Kedua, massa menuntut Gubernur Kalimantan Barat, Ketua DPRD Kalbar, dan Kapolda Kalbar untuk menerima massa aksi serta memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa di Air Upas.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima massa aksi, di antaranya Ria Norsan selaku Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan selaku Wakil Gubernur Kalbar, serta Harisso n selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar. Turut hadir pula Kompol Lely Suheri, S.H., M.H. selaku Kasubdit I Krimum Polda Kalbar.

Masa meninggalkan kantor gubernur dengan tertib tanpa adanya gangguan trantibum. Demikian dilaporkan Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Fomda Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 703 / SATPOL.PP tanggal 29 April 2026, Melakukan Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Fomda Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Dialog yang terbuka dan kolaboratif menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan industrial di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi secara terukur dan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus terus mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara bertahap. Perhatian juga diberikan pada kepatuhan perusahaan dalam pembayaran upah dan THR, penguatan K3, serta pentingnya transparansi dalam jenjang karier dan status kepegawaian. Melalui penguatan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 716 / SATPOL.PP tanggal 30 April 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Oleh Sentral Perjuangan Rakyat Kalbar (SPARKA) Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), jajaran Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa pada Jumat, 1 Mei 2026, sekitar pukul 08.30 WIB. Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Aksi tersebut digelar oleh elemen Sentral Perjuangan Rakyat Kalbar (Sparka) dengan jumlah massa sekitar 50 orang. Bertindak sebagai koordinator lapangan adalah Sdr. Raden. Dalam kegiatan tersebut, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi yang dilakukan di sepanjang area depan Kantor Gubernur hingga ke bagian lobi.

Pengamanan kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto. .S.I.K.,M.Si dan beliau menyampaikan bahwa pihak kepolisian hadir untuk memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

“Kami dari Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan secara humanis dan profesional guna menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujar Kombes Pol Endang Tri Purwanto.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali. Personel pengamanan juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi guna mengantisipasi kepadatan kendaraan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar area tersebut.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 900 / SATPOL.PP tanggal 3 Juni 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Di Kantor Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Audiensi konfederasi serikat buruh Sejahtera Indonesia KSBSI

Pada hari rabu tanggal 3 Juni 2026 Pukul 09.15 Wib

Bertempat di Kantor Disnakertrans Jalan Jend. Ahmad Yani Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

Dengan Koordinator Sdr. Suja Arianto

Jumlah Peserta 11Orang yang terdiri dari 3 orang dari KSBSI dan 8 Orang dari Disnakertrans

Hal² yg dilaporkan Sbb :

1. Kegiatan pertemuan dilaksanakan di Ruang ” Ruai Temuai Datai ” dimulai pada Pukul 09.15. WIB.
2. Pertemuan audiensi dari Disnakertrans dipimpin oleh Kadisnakertrans Ahmad Priyono didampingi kbid Pengawasan Sutowo beserta pengawas Tenaga kerja yang berjumlah 5 orang, Sedangkan dari pihak Serikat Pekerja dipimpin Oleh Suja Arianto sebagai Ketua Korwil KSBSI beserta 3 orang pendamping.
3. Adapun Topik utama audiensi ini mengenai pelanggaran hak norma kerja, jaminan sosial, serta tuntutan sanksi terhadap dua perusahaan,

yaitu PT. BABL dan PT. BPG (Bumi Perkasa Gemilang). Adapun permasalahan dari PT.BPG antara lain: Status Pekerja BHL tidak ada perjanjian selama bekerja, THR yang belum dibayarkan oleh perusahaan tahun 2025 sebanyak 25 orang, Jaminan sosial sebagian pekerja belum di daftarkan oleh pihak perusahaan. Sedangkan permasalahan PT. BABL yang diangkat antara lain : status pekerja yang mayoritas BHL di semua bagian, tidak adanya perjanjian Kerja buruh yang bekerja disana, dan diduga tidak adanya peraturan perusahaan sebab belum pernah di sosialisasikan kepada para pekerja. Menurut Serikat pekerja PT. BABL dan PT. BPG dinilai sangat tertutup dan sulit diajak berkomunikasi. KSBSI mendesak agar kedua perusahaan ini diberikan sanksi yang berat dan dapat diproses hukum jika tidak mampu memenuhi hak-hak pekerja, selain itu KSBSI meminta Pemkab Kubu Raya agar dalam setiap proses perpanjangan izin operasional perusahaan, pihak manajemen wajib menghadirkan perwakilan pekerja guna memastikan seluruh hak buruh telah terpenuhi.

4. Menanggapi hal tersebut kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono menyatakan bahwa sanksi administratif saat ini masih "kurang menggigit". Disnakertrans sedang berkoordinasi dan mengkaji wacana dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menerapkan sanksi finansial/biaya tambahan yang lebih berat bagi perusahaan nakal yang mengabaikan hak-hak pekerja. Selain itu penegasan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan data buruh terdaftar dengan status hubungan kerja yang jelas secara hukum di perusahaan. Beliau juga Menugaskan tim pengawas untuk melakukan monitoring melekat (monitoring update) guna memastikan realisasi pembayaran hak-hak buruh di lapangan. Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans, Pak Sutowo, menegaskan bahwa kewenangan Pengawas PNS Dinas Tenaga Kerja terbatas oleh regulasi yang berlaku. Tugas utama tim pengawas adalah memastikan kepatuhan terhadap norma kerja serta menjalin komunikasi guna perbaikan norma di lingkungan perusahaan, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan dalam ranah penuntutan hak secara langsung maupun eksekusi hukum.
5. Dari pihak KSBSI yang diwakili oleh Pengawas Furqan dalam kesempatan ini melaporkan perkembangan positif dari PT. BPG mengenai hak THR bagi 25 orang pekerja. Manajemen pusat di Jakarta telah memberikan persetujuan (ACC) dan memastikan pembayaran akan rampung dalam minggu ini sehingga statusnya dinyatakan klir.
6. Kepala Dinas tetap menginstruksikan tim pengawas untuk terus memonitor realisasinya di lapangan. Namun, untuk usulan pengangkatan status karyawan yang sempat diajukan pengawas,

pihak manajemen mengembalikan keputusan tersebut kepada internal perusahaan; hal ini disebabkan oleh tingkat perputaran karyawan (turnover) di PT. BPG yang cukup tinggi.

Sehingga perusahaan masih menerapkan seleksi yang sangat ketat. Sementara itu, penanganan pada PT. BABL menunjukkan dinamika hukum yang berbeda, di mana pada tanggal 20 lalu telah dilakukan Gelar Kasus bersama Korwas Polda Kalbar dan Anggota DPRD untuk menjajaki peluang peningkatan status ke tahap Gelar Perkara. Kendati demikian, proses ini menghadapi kendala regulasi setelah banyak pihak menyarankan langkah-langkah penanganan yang lebih komprehensif; jika dipaksakan ke ranah pidana/denda saat ini, aturan yang ada hanya mampu menjatuhkan denda administratif berkisar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dinilai tidak akan memberikan efek jera bagi perusahaan dan juga memberikan dampak negatif kedepan yang berkepanjangan, untuk itu di coba kembali untuk mengambil langkah-langkah komunikatif dengan pihak pengawas dan perusahaan agar masalah ini dapat di selesaikan dengan baik.

7. Pada kesempatan ini juga disampaikan oleh perwakilan buruh bahwa, kondisi ketenagakerjaan di PT. BABL saat ini mencatat baru 4 orang pekerja yang berhasil diangkat menjadi karyawan tetap, sedangkan 3 orang pekerja lainnya telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 964 / SATPOL.PP tanggal 11 Juni 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmadapar Di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah dan DPRD memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) n ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 15.45 WIB itu diwarnai dengan tuntutan evaluasi kebijakan anggaran daerah, pengendalian harga

kebutuhan pokok, hingga perhatian terhadap persoalan distribusi energi dan logistik yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat. Sekretaris Jenderal Solmadapar Kalbar, Barnas, mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta respons langsung dari para wakil rakyat. Kami masih menunggu kehadiran DPRD. Jika hari ini tidak ada yang menemui kami, tentu menjadi pertanyaan besar mengenai komitmen mereka dalam mendengar aspirasi masyarakat," kata Barnas di sela-sela aksi. Menurutnya, salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang dan kebutuhan pokok di berbagai daerah. Barnas menilai persoalan distribusi bahan bakar di Kalimantan Barat masih menyisakan berbagai permasalahan yang berdampak terhadap ketersediaan BBM di tingkat masyarakat, dengan jumlah masa dari solmadapar sebanyak 12 orang pendemo yang ada di Halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Demikian dilaporkan Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi SORLMADAPAR Di Halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1112 / SATPOL.PP tanggal 19 Juni 2026, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

B. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Lokasi Atau Aset Milik Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 573 / SATPOL.PP tanggal 10 April 2026, dilaksanakan pada tanggal 11 April 2026 Dalam Rangka Koordinasi

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Halal Bi Halal Pemuda Ketapang Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 11 April 2026 di mulai pukul 08.00 WIB di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini - Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Halal bihalal menjadi lebih dari sekadar ajang silaturahmi, ini adalah momentum memperkuat semangat bersama dalam membangun daerah. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengajak masyarakat Ketapang di perantauan untuk terus berkontribusi dan menjaga kebersamaan sebagai pondasi percepatan pembangunan, khususnya di wilayah selatan Kalbar. Melalui pemaparan rencana pembangunan 2026-2028, Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memastikan pemeliharaan berjalan berkelanjutan. Dengan sinergi dan dukungan semua pihak, optimisme untuk menghadirkan perubahan nyata di Ketapang dan Kayong Utara semakin kuat.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 607 / SATPOL.PP tanggal 15 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 17 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Paskah Betang Raya Pegawai Dayak Kalbar Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 17 April 2026 di mulai pukul 16.00 WIB di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.
Hasil temuan di lapangan

Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengajak Pegawai Dayak untuk mengambil peran sebagai perekat sekaligus payung keberagaman di tengah masyarakat. Menurutnya, meski tergolong organisasi yang masih muda, BRPD telah menunjukkan kontribusi nyata melalui berbagai kegiatan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Momentum Paskah juga menjadi pengingat penting akan nilai pengorbanan, kasih, dan pengabdian, yang perlu diwujudkan dalam pelayanan yang tulus, integritas, serta dedikasi sebagai abdi negara. Ke depan, BRPD diharapkan terus berkembang secara profesional, memperluas jaringan hingga ke seluruh kabupaten/kota, serta semakin memperkuat peran dalam mendukung pembangunan dan menjaga harmoni di Kalimantan Barat. Pada Kegiatan Paskah Betang Raya Pegawai Dayak Kalbar di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 616 / SATPOL.PP tanggal 16 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Apel KARHUTLA Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu pelaksanaan tanggal 16 April 2026 di mulai pukul 07.00 WIB bertempat di Halaman Kantor Gubernur

2. PERSONIL

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

3. KEGIATAN

- a. Tim dibawah kendali Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Koordinator Lapangan Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini (Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.) bersama Tim melakukan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum.
- b. Deteksi dini antisipasi potensi gangguan Trantibum Pada Kegiatan Apel KARHUTLA Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak.

Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 menjadi wujud komitmen bersama dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di

Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, didukung dengan peningkatan patroli, pengawasan, dan respons cepat di wilayah rawan.

Seiring potensi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal, kesiapsiagaan menjadi hal utama yang harus terus dijaga. Langkah antisipatif dan deteksi dini diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sejak awal. Mari bersama menjaga lingkungan dan mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari karhutla. Hingga kegiatan Apel KARHUTLA selesai, tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 647 / SATPOL.PP tanggal 21 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Komitmen Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Terus Diperkuat. Gubernur Kalbar Ria Norsan Mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Menjadi Garda Terdepan Dalam Mengentaskan Anak Putus Sekolah Sekaligus Memperluas Akses Pendidikan Yang Inklusif Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Melalui Inovasi Dan Digitalisasi, PKBM Diharapkan Mampu Menjawab Tantangan Zaman, Tidak Hanya Menghadirkan Pendidikan Kesetaraan, Tetapi Juga Membekali Masyarakat Dengan Keterampilan Yang Relevan Dengan Dunia Kerja. Dengan Semangat Kolaborasi Lintas Sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menargetkan Lahirnya Desa SAKTI, Desa Tanpa Anak Putus Sekolah, Sebagai Langkah Nyata Menuju Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendidikan Untuk Semua, Tanpa Batas Usia. Dari Desa, Untuk Masa Depan Kalbar Yang Lebih Maju. Pada Kegiatan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 673 / SATPOL.PP tanggal 24 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam

Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Halal Bi Halal STM 2 Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri sekaligus menjadi tuan rumah Halal Bihalal Ikatan Alumni STM Transisi/STM 2, kini SMKN 4 Pontianak, yang mempertemukan lintas generasi dalam suasana akrab dan kekeluargaan. Momen ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga adab kepada guru serta memperkuat solidaritas antar alumni. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam perjalanan hidup dan kunci keberkahan ilmu.

Selain mempererat silaturahmi, para alumni juga terus menunjukkan kontribusi nyata melalui berbagai kegiatan sosial dan dukungan bagi siswa aktif, sebagai wujud kepedulian terhadap almamater. Kebersamaan ini diharapkan dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berprestasi serta membawa nama baik sekolah ke tingkat yang lebih luas.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 818 / SATPOL.PP tanggal 19 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Dalam Pertemuan Bersama Kepala Welcome Dinner Pekan Gawe Dayak XI Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar Ria Norsan, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, persatuan, dan kondusivitas daerah dalam rangkaian Welcome Dinner Pekan Gawai Dayak ke-40 Tahun 2026. Pekan Gawai Dayak bukan hanya menjadi wujud rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan, melestarikan budaya, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM dan kunjungan tamu dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Semangat kebersamaan yang terjalin dalam keberagaman diharapkan terus menjadi kekuatan untuk membangun Kalimantan Barat yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

Kegiatan Ini Di Hadiri Oleh Pak Gubernur Pak Wagub, Forkopinda dan tamu undangan sekitar kurang lebih 600 Orang di pendopo gubernur Kalimantan barat.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 842 / SATPOL.PP tanggal 22 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Perbakin Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Pengprov Perbakin) Kalimantan Barat. Pelantikan ditandai dengan penyerahan Bendera Pataka oleh Ketua Umum PB Perbakin, Jenderal TNI (Purn.) Joni Supriyanto, di Pendopo Gubernur Kalbar.

Dalam sambutannya, Krisantus Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Ketua Umum PB Perbakin yang hadir langsung melantik jajaran pengurus baru Perbakin Kalbar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak diukur dari seremonial semata, melainkan dari kemampuan melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Indikator keberhasilan bukan terletak pada baju yang kita pakai atau teriakan penuh semangat, tetapi sejauh mana kita mampu melahirkan atlet-atlet menembak berbakat dan berprestasi.

Krisantus berharap pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan mampu mencetak atlet menembak andal yang dapat mengharumkan nama Kalbar di tingkat nasional maupun internasional.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 847 / SATPOL.PP tanggal 22 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Dieanatalis SMA Negeri 4 Pontianak Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Nuansa kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai kegiatan Silaturahmi Halal Bihalal dan Reuni Lintas Angkatan SMAN 4 Pontianak Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan, mengajak seluruh alumni untuk terus mempererat silaturahmi serta membangun kontribusi positif bagi almamater, masyarakat, dan pembangunan daerah. Mengusung tema "Dari Kita, Untuk Kita", reuni ini menjadi momentum memperkuat hubungan antargenerasi alumni sekaligus menumbuhkan kepedulian bersama terhadap SMAN 4 Pontianak.

Kegiatan turut dimeriahkan dengan senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, gelar UMKM, hiburan, hingga doorprize yang semakin menambah semarak suasana penuh keakraban. Kegiatan ini dihadiri sekitar 700 undangan yang terdiri dari alumni lintas angkatan mulai lulusan tahun 1981 hingga 2025, dewan guru, mantan guru, serta siswa SMA Negeri 4 Pontianak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan yang juga merupakan alumni SMA Negeri 4 Pontianak. Sebelum acara puncak dimulai, para alumni mengikuti kegiatan senam sehat bersama Bupati Mempawah Hj. Erlina Ria Norsan alumni angkatan 1989 dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono alumni angkatan 1982.

Kegiatan semakin semarak dengan bazar UMKM yang menjajakan berbagai makanan serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kalbar. Acara HBH juga diisi tausyiah oleh Ustaz Jalaluddin dan penampilan seni dari masing-masing angkatan alumni yang menambah suasana nostalgia dan kekeluargaan. Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar H. Ria Norsan mengapresiasi pelaksanaan HBH alumni SMAN 4 Pontianak yang mampu mempererat hubungan antarsesama alumni. Acara HBH bisa mempertemukan sesama alumni yang sudah sekian lama tidak bertemu. Sekarang bisa bertemu kembali dan bernostalgia," ungkapnya. Dia juga menyampaikan bahwa momentum tersebut menjadi kesempatan bagi alumni untuk kembali bertemu para guru yang pernah mendidik mereka semasa

sekolah. Pesan saya jagalah kesatuan dan persatuan antara alumni agar tetap terjaga dengan baik. Jangan ada kesombongan,

Ketua Forum Komunikasi Alumni SMAN 4 Pontianak (FKASMAN 4 PTK), Maswadi, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalbar, Bupati Mempawah, serta seluruh panitia HBH yang diketuai Sukaliman dengan sekretaris H. Decky Jukni. Maswadi juga mengapresiasi dukungan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kalbar yang dipimpin dr. Erna, alumni angkatan 1993. Dia turut menyampaikan bahwa sejumlah alumni yang berprofesi sebagai dokter masih berjuang menyelesaikan studi profesinya. Kami juga memiliki Dekan Fakultas Teknik yang merupakan alumni SMAN 4 Pontianak, Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 4 Pontianak, Neneng, mengaku bangga dan terharu melihat semangat para alumni menghadiri acara HBH tersebut. Saya terharu dan bangga sekali atas kontribusi para alumni terhadap sekolahnya, khususnya dalam pembangunan Mushola Nurul Hidayah yang kini sudah berdiri megah di lingkungan sekolah, Neneng juga menyampaikan terima kasih kepada Hj. Erlina Ria Norsan atas perhatian dan dukungannya terhadap pembangunan mushola serta kegiatan HBH. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Gubernur H. Ria Norsan yang telah menyumbangkan karpet mushola dengan desain kekinian. Pada kesempatan yang sama, Bupati Mempawah Hj. Erlina Ria Norsan memberikan apresiasi kepada panitia HBH atas suksesnya penyelenggaraan acara. “Inilah kekompakan para alumni dan pengurusnya,” ujarnya.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 899 / SATPOL.PP tanggal 03 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Dieanatalis SMA Negeri 4 Pontianak Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Penampilan produk menjadi hal pertama yang dilihat konsumen. Karena itu, kemasan harus dibuat menarik, berkualitas, dan mampu mencerminkan nilai produk yang dijual. Untuk mendukung pengembangan usaha para perajin dan pelaku UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Kalbar juga terus membuka akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan. Program tersebut diharapkan mampu membantu para pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat daya saing produk kerajinan lokal. Dalam kesempatan itu, Norsan juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antar-pengurus Dekranasda di seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah akan berkontribusi langsung terhadap kemajuan Kalimantan Barat secara keseluruhan. Jika daerah maju, maka provinsi juga akan maju. "Kemajuan Kalimantan Barat dimulai dari kemajuan daerah-daerahnya," ujarnya. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan, menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi kerajinan yang sangat besar dan beragam. Mulai dari tenun tradisional, anyaman, ukiran kayu, hingga kerajinan manik-manik yang memiliki nilai budaya tinggi dan menjadi identitas masyarakat setempat.

Namun, menurutnya, para perajin masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain peningkatan kualitas produk, inovasi desain, pengemasan, legalitas usaha, hingga akses pemasaran yang lebih luas. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dekranasda Kalbar telah menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk pembangunan basis data perajin dan produk unggulan secara akurat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan fungsi galeri daerah sebagai pusat promosi produk unggulan. Kami ingin galeri daerah tidak hanya menjadi tempat display produk, tetapi juga menjadi etalase yang produktif, aktif, dan mampu mendukung peningkatan ekonomi para perajin," jelas Erlina.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga identitas produk unggulan di setiap daerah. Menurutnya, masing-masing galeri Dekranasda kabupaten/kota harus fokus mempromosikan produk khas daerahnya sendiri agar memiliki ciri khas dan daya saing yang kuat. Galeri daerah harus menjadi etalase kebanggaan daerah masing-masing. Identitas lokal harus terus dijaga dan diperkuat agar memiliki nilai tambah serta daya saing yang lebih tinggi. Erlina menambahkan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat akan terus berperan sebagai pusat promosi yang mengakomodasi seluruh produk kerajinan dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat, sementara Dekranasda daerah difokuskan untuk memperkuat identitas serta keunggulan produk lokal masing-masing. Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan penguatan promosi, Rakerda Dekranasda Kalimantan Barat Tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan berbagai program strategis yang dapat memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk kerajinan daerah, serta mendorong kesejahteraan para perajin sebagai pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 908 / SATPOL.PP tanggal 04 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Lemhannas Di Aula Garuda Komplek Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Semangat kebangsaan dan persatuan menjadi pesan utama dalam Seminar Kebangsaan bertema “Nilai Kebangkitan Nasional sebagai Cahaya di Tengah Pusaran Multikrisis Identitas Kebangsaan” yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kalimantan Barat di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, akademisi, tokoh nasional, serta unsur pemerintahan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan wawasan kebangsaan di tengah dinamika sosial yang dinilai dapat memengaruhi identitas nasional. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa Kalimantan Barat merupakan gambaran nyata keberagaman Indonesia, di mana berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa hidup berdampingan dalam suasana yang relatif harmonis. Menurutnya, keberagaman tersebut bukan sumber perpecahan, melainkan modal sosial yang harus terus dijaga dan dirawat bersama. Saya merasa bangga karena Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia. Keragaman itu bukan penghalang, tetapi kekuatan yang harus terus kita pelihara bersama. Ia menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berasal dari aspek ekonomi dan geopolitik, tetapi juga perubahan sosial yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap identitas bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kembali semangat persatuan serta menjaga nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda yang dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Norsan menegaskan, generasi muda tidak hanya dituntut cerdas dan inovatif, tetapi juga harus memiliki karakter dan integritas kebangsaan yang kuat. Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga berintegritas dan berkomitmen menjaga persatuan. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan semangat Kebangkitan Nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari

Menurutnya, penguatan nilai kebangsaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berkelanjutan. Mari menjadikan semangat Kebangkitan Nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk memperkuat persatuan dan membangun kehidupan yang harmonis,

Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, Purnomo Yusgiantoro, memberikan apresiasi atas terselenggaranya seminar tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Menurutnya, kesadaran kebangsaan perlu terus dibangun secara berkelanjutan agar nilai-nilai nasionalisme tetap terjaga di seluruh lapisan masyarakat. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Seminar seperti ini penting dan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, Seminar Kebangsaan IKAL Lemhannas Kalbar ini diharapkan menjadi ruang dialog sekaligus penguatan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga persatuan, toleransi, dan identitas nasional di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

C. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kewaspadaan Dini, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 536 / SATPOL.PP tanggal 3-5 April 2026. Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Menjelang Perayaan Paskah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 3 – 5 April 2026 di mulai pukul 18.00 WIB di Gereja Katedral Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Perayaan Paskah 2026 di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, Kalimantan Barat, berlangsung khidmat pada 4-5 April 2026. Rangkaian ibadah mencakup Misa Malam Paskah (Vigili) pada Sabtu malam dan Misa Minggu Paskah. Fokus perayaan adalah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dengan berbagai misa yang dihadiri ribuan umat, termasuk misa pontifikal. Perayaan Paskah tahun 2026 di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak berlangsung dengan penuh khidmat

dan sukacita. Umat Kristiani memadati gereja sejak sore hari untuk mengikuti rangkaian ibadah Malam Paskah yang menjadi puncak peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Suasana religius terasa kuat sepanjang perayaan, dengan lantunan doa dan pujian yang menggambarkan kemenangan terang atas kegelapan serta harapan baru bagi kehidupan. Paskah tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat nilai kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, turut hadir dalam perayaan tersebut bersama jajaran dan keluarga. Kehadiran pemerintah menjadi simbol dukungan terhadap kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat Kalbar yang majemuk. Dalam kesempatan itu, Krisantus menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada seluruh umat yang merayakan. Ia mengajak masyarakat menjadikan Paskah sebagai refleksi untuk mempererat persaudaraan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Paskah adalah momen untuk memperkuat rasa kemanusiaan, meningkatkan kepedulian, dan menumbuhkan semangat saling menghargai antar sesama. Ia menegaskan, nilai pengorbanan yang diajarkan dalam Paskah menjadi landasan penting dalam kehidupan sosial. Menurutnya, sikap saling membantu dan gotong royong harus terus dipupuk demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama serta mempererat silaturahmi. Keberagaman adalah kekuatan kita. Dengan semangat Paskah, mari kita jaga persatuan, tingkatkan solidaritas, dan bersama-sama membangun Kalbar yang lebih maju,” tambahnya. Perayaan Paskah 2026 ini pun menjadi simbol harapan baru bagi seluruh masyarakat, sekaligus pengingat akan pentingnya hidup dalam damai, rukun, dan saling menghormati di tengah perbedaan.

Pada Kegiatan Menjelang Perayaan Paskah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 538 / SATPOL.PP tanggal 2 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 5 April 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Silaturahmi Idul Fitri 1447 H Keluarga Besar Muhammadiyah Kalimantan Barat di Universitas Muhammadiyah Pontianak Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 5 April 2026 di mulai pukul 08.00 WIB di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Silaturahmi Idulfitri 1447 H dan Pelepasan Jamaah Calon Haji KBIHU Muhammadiyah Kalimantan Barat yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Pontianak berlangsung khidmat dan penuh makna. Kegiatan ini mencerminkan kuatnya sinergi dalam mempersiapkan jamaah, baik secara spiritual maupun fisik, agar dapat menunaikan ibadah haji dengan optimal. Sekda Kalbar Harisson, menekankan pentingnya meluruskan niat semata-mata karena Allah SWT, serta mengingatkan agar ibadah haji tidak dijadikan sebagai kebanggaan duniawi, melainkan sebagai perjalanan spiritual untuk meraih ridha-Nya. Dengan berbagai dukungan dan pembinaan yang terus diperkuat, diharapkan seluruh jamaah mampu menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, aman, dan penuh kekhusyukan. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Pada Kegiatan Silaturahmi Idul Fitri 1447 H Keluarga Besar Muhammadiyah Kalimantan Barat di Universitas Muhammadiyah Pontianak Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 626 / SATPOL.PP tanggal 17 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 18 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan PW BKMT Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam membangun keluarga yang berakhlak, sehat, cerdas, dan mandiri. Pada momentum Halal Bihalal BKMT Provinsi Kalimantan Barat, Ketua TP PKK Kalbar, Dr. Hj. Erlina, menekankan pentingnya memperkuat peran tersebut melalui kebersamaan, silaturahmi, serta penguatan nilai-nilai keimanan pasca-Ramadan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga wadah mempererat ukhuwah dan menambah wawasan melalui tabligh akbar. Sinergi antara PKK dan BKMT pun terus didorong agar pembinaan umat, khususnya perempuan, semakin optimal dan memberikan dampak luas di tengah masyarakat. Di tengah dinamika perkembangan zaman, perempuan diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat serta membangun keluarga sakinah sebagai fondasi masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Momentum Halal Bihalal menjadi pengingat pentingnya memperkuat nilai-nilai kehidupan dalam keluarga. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menekankan bahwa pendidikan keluarga berbasis akhlakul karimah merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berintegritas, dan berakhlak mulia. Dalam suasana Idul Fitri 1447 H, ajakan untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang harmonis. Kegiatan Halal Bihalal BKMT ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat syiar agama di Kalimantan Barat.

Mari terus menjaga kebersamaan, memperkuat keimanan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga sebagai bekal generasi masa depan.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 627 / SATPOL.PP tanggal 17 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 19 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Halal Bi Halal dan Tablik Akbar MABMKB Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan pentingnya menjaga adab dan marwah Melayu sebagai pondasi menghadapi era digital dalam Halal Bihalal bersama Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Di tengah derasnya arus informasi, budaya Melayu hadir sebagai penuntun, mengajarkan santun dalam bertutur, bijak dalam bersikap, dan kuat dalam menjaga jati diri. Tradisi seperti Tundang hingga inovasi seperti Pantunin AI menjadi bukti bahwa warisan leluhur mampu berjalan seiring dengan modernitas. Lebih dari sekadar seremoni, momentum ini menguatkan silaturahmi, mempertegas identitas, sekaligus mendorong peran MABM sebagai jembatan antara nilai luhur masa lalu dan tantangan masa depan. Mari jaga adat, rawat budaya, dan teguhkan persatuan untuk Kalimantan Barat yang rukun dan bermartabat.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 646 / SATPOL.PP tanggal 21 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Naik Dango Ke 3 di Rumah Radang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa budaya merupakan jati diri suatu suku dalam sebuah bangsa, dan masyarakat yang tidak menjaga budayanya akan kehilangan identitas

serta tergerus perkembangan zaman. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat keberagaman sebagai kekuatan bersama serta mencintai Kalimantan Barat sebagai rumah yang mempersatukan berbagai latar belakang. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong kegiatan budaya sebagai bagian dari penguatan jati diri daerah sekaligus penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 674 / SATPOL.PP tanggal 24 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 26 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi melepas jemaah calon haji Muhammadiyah Kalimantan Barat dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik serta kedisiplinan dalam menjaga sikap dan perilaku. Kebersamaan, kesehatan, serta keikhlasan menjadi kunci dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah. Diiringi lantunan talbiyah, doa dipanjatkan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Selamat menunaikan ibadah haji, semoga perjalanan ini membawa keberkahan dan menjadi pengalaman spiritual yang penuh makna.

Pada Kegiatan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 702 / SATPOL.PP tanggal 29 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 29 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan

Pembekalan purna tugas Para ASN Yang akan memasuki masa pensiun di Aula Garuda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Masa purna tugas bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang tetap penuh makna. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengajak para ASN yang akan memasuki masa pensiun untuk tetap produktif, mandiri, dan terus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Pengalaman panjang selama mengabdikan menjadi bekal berharga untuk melanjutkan langkah di fase berikutnya.

Melalui semangat "Dari Pengabdian Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan", para ASN didorong untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, seperti berwirausaha, terlibat dalam aktivitas sosial, maupun mengembangkan minat dan hobi. Selain itu, kesiapan finansial, kesehatan, dan spiritual juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Pengabdian mungkin telah selesai, namun semangat berkarya dan berbagi manfaat diharapkan tetap terjaga.

Pada Kegiatan Pembekalan purna tugas Para ASN Yang akan memasuki masa pensiun di Aula Garuda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 718 / SATPOL.PP tanggal 30 April 2026. dilaksanakan pada tanggal 26 April 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan persiapan Keberangkatan Calon Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi melepas jemaah calon haji Kalimantan Barat dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik serta kedisiplinan dalam menjaga sikap dan perilaku. Kebersamaan,

kesehatan, serta keikhlasan menjadi kunci dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah. Diiringi lantunan talbiyah, doa dipanjatkan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Selamat menunaikan ibadah haji, semoga perjalanan ini membawa keberkahan dan menjadi pengalaman spiritual yang penuh makna. dengan jemaah calon haji kalimantan barat berjumlah 1861 semoga semua menjadi haji yang mabrur dan semoga calon jemaah bisa pulang ke tanah air dengan selamat bisa bertemu dengan keluarga.

Anggota tim sat pol pp melakukan larangan berjualan di dalam asrama haji kepada para pedagang kaki lima selama kegiatan pemberangkatan calon jemaah haji kalimantan barat.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 730 / SATPOL.PP tanggal 4 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Keberangkatan Calon Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Sebanyak 157 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kota Singkawang yang tergabung dalam Kloter 14 dilepas langsung oleh Sekda Kalbar Harisson, dari Asrama Haji Pontianak. Momentum ini menjadi awal dari perjalanan spiritual yang telah dinantikan bertahun-tahun oleh para calon tamu Allah. Dalam arahnya, Sekda Kalbar menekankan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat solidaritas, serta saling peduli, khususnya bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

Kekompakan dan kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, Doa dan harapan mengiringi langkah para jemaah, Semoga seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

Penrbangan Pertama Dalam Kloter 14

Selasa 05 Mei 2026 9.00 Wib 20.15 Wib

Kota Singkawang (157) 157 PPIH KLOTER 14 4 161 Lion Air 23.30 Wib
00.45 Wib

Penerbangan Ke 2 Dalam Kloter 14

Kab. Sambas (19),

Kab. Sanggau (16),

Kab. Landak (3),

Kab. Bengkayang (10),

Kota Pontianak (103), KBIHU (1) 152 152 Lion Air

Rabu 06 Mei 2026 04.00 Wib 05.15 Wib

Penerbanagan Pertama Dalam Kloter 15

Kota Pontianak (128), KBIHU (1) , PHD (2) 131 131 Lion Air

Penerbanagan KE 2 Dalam Kloter 15

Rabu 06 Mei 2026 09.00 Wib 10.15 Wib

Kab. Kubu Raya (30),

Kota Pontianak (119), KBIHU (1), 150 PPIH KLOTER 15 4 154 Lion Air
13.30 Wib 14.45 Wib

Penerbanagan KE 3 Dalam Kloter 15

Kota Pontianak (154) 154 154 Lion Air 18.00 Wib 19.45 Wib

Penerbanagan KE 4 Dalam Kloter 15

Kota Pontianak (135), PHD (2) 137 137 Lion Air

KAMIS 07 MEI 2026 09.00 Wib 10.15 Wib

Penerbanagan Pertama Dalam Kloter 16

Kota Pontianak (151), KBIHU (1) 152 PPIH KLOTER 16 4 156 Lion Air
13.30 Wib 14.45 Wib

Penerbanagan Ke 2 Dalam Kloter 16

Kota Pontianak (152), KBIHU (1), 153 153 Lion Air 18.00 Wib 19.45 Wib

Penerbanagan ke 3 Dalam Kloter 16

Kota Pontianak (134), PHD (2) 136 136 Lion Air

JUM'AT 08 MEI 2026 09.00 Wib 10.15 Wib

Penerbanagan Pertama Dalam Kloter 17

Kota Pontianak (155), PHD (1) 156 PPIH KLOTER 17 4 160 Lion Air
13.30 Wib 14.45 Wib

Penerbanagan ke 2 Dalam Kloter 17

Kota Pontianak (152), KBIHU (1), 153 153 Lion Air 18.00 Wib 19.45 Wib

Penerbanagan ke 3 Dalam Kloter 17

Kota Pontianak (125),

Kubu Raya (5), PHD (1) 131 131 Lion Air

SABTU 09 MEI 2026 09.00 Wib 10.15 Wib

Penerbanagan Terakhir Dalam 1 Penerbangan Kloter 18

Kab. Sintang (32),

Kab. Melawi (8),

Kab. Kapuas Hulu (2),

Kab. Ketapang (12),

Kab. Kayong Utara (12),

Kab. Mempawah (12),

Kab. Sekadau (3), PHD (1) 82 PPIH KLOTER 18 1 83 Lion Air , Dengan Jumlah Keseluruhan Calon Jamaah Haji Kalimantan Barat Berjumlah 1861 Calon Jamaah Haji Yang Berangkat Menuju Mekah.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 766 / SATPOL.PP tanggal 8 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Halal Bi Halal Konsolidasi dan Pelantikan DPW IKAMA Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kemajuan olahraga sekaligus pelestarian budaya bangsa melalui pembinaan pencak silat di daerah. Gubernur Kalbar Ria Norsan, menegaskan pentingnya pembinaan atlet sejak dini agar mampu melahirkan generasi berprestasi yang menjunjung sportivitas dan membawa nama Kalbar di tingkat nasional maupun internasional. Pencak

silat juga dinilai sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa yang harus terus dijaga di tengah perkembangan zaman.

Melalui kolaborasi bersama KONI dan Disporapar, pembinaan seluruh cabang olahraga di Kalimantan Barat diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan. Kepengurusan IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya periode 2025-2030 pun diharapkan mampu mencetak prestasi terbaik untuk daerah.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan ditutup dengan atraksi pencak silat dari perwakilan IPSI Pontianak dan Kubu Raya yang menambah semangat baru bagi perkembangan pencak silat di Bumi Khatulistiwa. Pada Kegiatan Gubernur Dalam Pertemuan Bersama Kepala Regional Bgn Kalbar Beserta Korwil Se Kalbar Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

11. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 767 / SATPOL.PP tanggal 8 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Dalam Pertemuan Bersama Kepala Regional Bgn Kalbar Beserta Korwil Se Kalbar Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Pemprov Kalbar terus memperkuat sinergi lintas sektoral dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui koordinasi bersama seluruh leading sector, Pemprov Kalbar menekankan pentingnya validasi data secara real-time serta pengawasan menyeluruh terhadap operasional dapur umum, mulai dari kebersihan, kualitas gizi, hingga keamanan pelaksanaan program.

Kolaborasi bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas serta memastikan program berjalan transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Program MBG diharapkan menjadi langkah bersama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil sekaligus mewujudkan generasi Kalbar yang sehat, kuat, dan berkualitas.

12. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 817 / SATPOL.PP tanggal 19 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAPERDA) Pendidikan Dan Latihan Daerah (DIKLATDA) Dan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Prov Kalbar Di Hotel Alimoer Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar Ria Norsan, menekankan bahwa pengusaha muda harus memiliki mental yang kuat, disiplin, serta menjunjung tinggi kejujuran sebagai fondasi utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Selain itu, para pelaku usaha juga diajak untuk memperkuat sinergi dan membangun pola pikir kolaboratif, dengan menjadikan sesama pengusaha sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 6,14 persen pada kuartal pertama tahun 2026 menjadi optimisme bersama bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Melalui momentum ini, HIPMI Kalbar diharapkan terus menjadi wadah lahirnya pengusaha muda yang inovatif, tangguh, dan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat. Pada Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAPERDA) Pendidikan Dan Latihan Daerah (DIKLATDA) Dan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Prov Kalbar Di Hotel Alimoer Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Berjalan Dengan Aman Dan Lancar.

13. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 830 / SATPOL.PP tanggal 20 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pembukaan Pekan Gawe Dyak Ke 40 Tahun 2026 Di Rumah Radank Provinsi Kalimantan Barat 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan menegaskan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-40 Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat persatuan masyarakat multikultural sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah saat membuka kegiatan tersebut di Rumah Radakng Pontianak, Pembukaan PGD ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional kangkuang sebagai simbol dimulainya perayaan budaya Dayak terbesar di Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Pekan Gawai Dayak merupakan milik seluruh masyarakat Kalimantan Barat sebagai ruang persatuan dalam keberagaman. Ia menyebut PGD tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya dan tradisi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui seni, kuliner, serta kearifan lokal yang ditampilkan. Pekan Gawai Dayak juga telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), sehingga diharapkan semakin memperkuat promosi budaya dan pariwisata Kalimantan Barat di tingkat nasional. Meski di tengah kebijakan pemangkasan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalbar tetap memberikan dukungan sebesar Rp300 juta untuk pelaksanaan PGD ke-40. Selain itu, Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, turut memberikan bantuan pribadi masing-masing sebesar Rp50 juta guna membantu pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Dewan Penasehat DAD Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengapresiasi antusiasme masyarakat dan pengunjung, termasuk tamu dari Malaysia, yang turut memeriahkan Pekan Gawai Dayak tahun ini. Ia berharap PGD ke depan semakin berkembang dan menjadi destinasi wisata budaya unggulan Kalimantan Barat yang mendapat dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Krisantus juga mengusulkan gerakan donasi sukarela masyarakat Dayak sebagai langkah membangun kemandirian pendanaan event budaya di Kalbar. Menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-40 juga diramaikan dengan Pawai Kendaraan Hias yang dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.

14. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 878 / SATPOL.PP tanggal 29 Mei 2026. dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelaksanaan Upacara Hari Lahirnya Pancasila Di Halaman Kantor Gubenur Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., selaku inspektur upacara dan diikuti oleh Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Wagub Kalbar, unsur Forkopimda Provinsi Kalbar, personel TNI-Polri, instansi pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat. Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen seluruh komponen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang dibacakan Gubernur Kalimantan Barat, disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi juga sarana refleksi untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap menjadi jiwa dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya sepanjang

perjalanan bangsa Indonesia. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang mampu mempersatukan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama dalam satu ikatan kebangsaan.

Lebih lanjut ditegaskan, Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga dinamika geopolitik dunia. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila juga tercermin melalui kontribusi Indonesia dalam berbagai upaya perdamaian dunia.

15. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 889 / SATPOL.PP tanggal 2 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pembukaan RAKERDA Dekranasda Se-Kalbar 2026 Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, selaku Pembina Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Kalimantan Barat Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gubernur Kalbar. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pengembangan industri kerajinan daerah yang berdaya saing, inovatif, serta mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dekranasda yang selama ini konsisten menjaga, melestarikan, dan mengembangkan berbagai produk kriya serta wastra khas Kalimantan Barat sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Meski demikian, Norsan menilai masih terdapat dua tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama agar produk kerajinan Kalimantan Barat semakin dikenal luas, yakni promosi dan kualitas kemasan produk.

Kita sebenarnya kurang promosi. Produk-produk kita bagus, tinggal bagaimana memperkenalkannya secara lebih luas hingga dikenal di tingkat nasional. Menurutnya, kualitas produk kerajinan Kalimantan Barat tidak kalah dibandingkan produk dari daerah lain. Berbagai hasil karya perajin seperti tenun, anyaman, ukiran, hingga produk berbasis kearifan lokal memiliki nilai seni dan kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

16. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 940 / SATPOL.PP tanggal 9 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Orientasi Kewartawanan Dan Organisasi (OOK) Ke 5 PWI Kalbar Di Aula Politeknik Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers melalui pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Angkatan V Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) itu mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas dan Berdaya Saing di Era Digital” serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pimpinan organisasi wartawan di Kalimantan Barat. OKK menjadi salah satu tahapan penting yang wajib diikuti calon anggota PWI sebagai bekal untuk memahami profesi jurnalistik, kode etik, serta organisasi sebelum resmi bergabung menjadi anggota PWI.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa orientasi kewartawanan memiliki peran strategis dalam membentuk wartawan yang profesional sekaligus memperkuat organisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar proses administrasi keanggotaan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas dan marwah profesi wartawan. Hari ini PWI Kalbar menggelar OKK dan acara ini penting serta strategis sebagai tahapan untuk menguatkan pemahaman calon anggota PWI

dalam menjalani profesi kewartawanan sekaligus bagian dari proses rekrutmen menjadi anggota PWI, Munir mengapresiasi konsistensi PWI Kalbar yang secara rutin menyelenggarakan OKK sebagai langkah menjaring anggota baru yang berkualitas dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan bertanggung jawab. Menurutnya, wartawan memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Produksi karya-karya jurnalistik dari anggota PWI harus mampu berkontribusi sebagai sarana edukasi, pemberdayaan masyarakat, sekaligus membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat, Sementara itu, Ketua PWI Kalbar Kundori menjelaskan bahwa OKK merupakan syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi organisasi. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan terkait kode etik jurnalistik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI, serta pelatihan dasar penulisan jurnalistik.

Orientasi ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota resmi PWI. Peserta dibekali pemahaman tentang kode etik, AD/ART PWI, hingga pelatihan penulisan, Kundori menambahkan bahwa calon anggota muda PWI harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya telah bekerja di perusahaan pers minimal satu tahun, memiliki kartu identitas pers, bekerja pada perusahaan pers berbadan Hukum, dan memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Setelah berstatus anggota muda selama dua tahun, wartawan dapat mengajukan peningkatan status menjadi anggota biasa yang kartu keanggotaannya diterbitkan oleh PWI Pusat. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Menurut Kundori, tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi di media sosial. Karena itu, profesionalisme dan kompetensi wartawan harus terus diperkuat agar masyarakat dapat membedakan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik dengan berbagai konten yang

belum tentu terverifikasi. Di era digital saat ini, jurnalisme memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat harus bisa membedakan antara informasi yang diproduksi wartawan profesional dengan konten yang beredar di media sosial. Karena itu, profesionalisme wartawan harus terus diperkuat, Melalui OKK Angkatan V Tahun 2026, PWI Kalbar berharap dapat melahirkan wartawan-wartawan yang tidak hanya memahami etika dan aturan profesi, tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pers dapat terus menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi yang akurat, pilar demokrasi, serta mitra pembangunan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

- 17.** Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 952 / SATPOL.PP tanggal 10 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan pelajar yang sedang mangkir / nongkrong pada jam belajar di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan, anggota Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdin) menemukan beberapa pelajar yang berada di Warkop Mawar, Jalan Tanjung Raya II, pada jam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Menindaklanjuti temuan tersebut, anggota Seksi Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh) memberikan pembinaan dan arahan kepada para pelajar yang diketahui tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah (bolos).

Selanjutnya, pada lokasi kedua yaitu My Cafe yang beralamat di Jalan Parit Makmur, Siantan, anggota Wasdin kembali menemukan sekitar 20 (dua puluh) orang pelajar dari SMK Negeri 2 yang sedang berada di lokasi warkop pada saat jam sekolah. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh anggota Wasdin yang terlebih dahulu melakukan pengawasan di lokasi, Seksi Binluh kemudian menindaklanjuti dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, serta imbauan kepada para

pelajar agar kembali ke sekolah dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat mengganggu proses pendidikan.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara persuasif dengan tujuan meningkatkan kesadaran para pelajar akan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sekolah serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Pada Kegiatan pelajar yang sedang mangkir / nongkrong pada jam belajar di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

- 18.** Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 963 / SATPOL.PP tanggal 11 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kegiatan Pembukaan Rakernas Xvi Arsada Di Hotel Novotel Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong transformasi pelayanan rumah sakit daerah melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan fleksibilitas pengelolaan keuangan guna menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas. Hal itu disampaikan Norsan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-16 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (11/6). Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan hadrah bersama para tamu undangan. Rakernas turut dihadiri Pendiri Arsada Umar Wahid dan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, yang mewakili Menteri Kesehatan. Dalam sambutannya, Norsan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Barat sebagai tuan rumah Rakernas Arsada ke-16. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan tata kelola rumah sakit daerah. Rakernas mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Harapan saya, Rakernas ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tema yang kita usung harus benar-benar diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Ia menyoroti masih adanya persepsi masyarakat terkait lambatnya pelayanan di rumah sakit daerah. Meski demikian, rumah sakit daerah tetap menjadi pilihan utama karena biaya pelayanan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Masyarakat masih menilai pelayanan rumah sakit daerah lambat. Namun, di sisi lain rumah sakit daerah dianggap lebih terjangkau. Karena itu, masyarakat tetap mempercayakan pelayanan kesehatannya ke rumah sakit daerah, Menurut Norsan, persepsi tersebut harus dijawab melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari pelayanan medis, ketepatan diagnosis, profesionalisme tenaga kesehatan hingga tata kelola manajemen rumah sakit. Stigma ini harus kita hilangkan. Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan berkualitas. Kecepatan pelayanan, kompetensi tenaga medis, dan manajemen yang baik harus menjadi prioritas,” tegasnya.

19. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 977 / SATPOL.PP tanggal 15 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 16 - 19 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kedatangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Sebanyak 157 Jamaah Haji asal Kota Singkawang yang tergabung dalam Kloter 14 sambut oleh kepala kanwil agama Pontianak di Asrama Haji Pontianak. Momentum perjalanan spiritual yang telah dinantikan bertahun-tahun oleh para tamu Allah.

Doa dan harapan mengiringi langkah para jamaah, seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

Kedatangan jama'ah haji pada hari rabu tanggal 17 juni 2026.

Jama'ah dari kota singkawang 157, PPIH KLOTER 14 (4)

Kab. Sambas (19), Kab. Sanggau (16), Kab. Landak (3)

Kab. Bengkayang (10)

Kota Pontianak (103), KBIHU (1)

Kota Pontianak (128), KBIHU (1) , PHD (2)

Kedatangan jama'ah haji pada hari kamis tanggal 18 juni 2026

Kab. Kubu Raya (30)

Kota Pontianak (119), KBIHU (1), PPIH KLOTER 15 (4)

Kota Pontianak (154)

Kota Pontianak (135), PHD (2).

Kedatangan jama'ah haji pada hari jum'at tanggal 19 juni 2026

Kota Pontianak (151), KBIHU (1), PPIH KLOTER 16 (4).

Kota Pontianak (152), KBIHU (1).

Kota Pontianak (134), PHD (2).

Pada Kegiatan Kedatangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

20. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 978 / SATPOL.PP tanggal 15 Juni 2026. dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Juni 2026. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kedatangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Sebanyak 155 Jamaah Haji asal Kota pontianak yang tergabung dalam Kloter 17 sambut oleh kepala kanwil agama Pontianak di Asrama Haji Pontianak. Momentum perjalanan spiritual yang telah dinantikan bertahun-tahun oleh para tamu Allah.

Doa dan harapan mengiringi langkah para jamaah, seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

Kedatangan jama'ah haji pada hari sabtu tanggal 20 juni 2026.

Kota Pontianak (155), PHD (1), PPIH KLOTER 17 (4).

Kota Pontianak (152), KBIHU (1).

Kota Pontianak (125), Kubu Raya (5), PHD (1).

Kedatangan jama'ah haji pada hari minggu tanggal 21 juni 2026

Kab. Sintang (32),

Kab. Melawi (8),

Kab. Kapuas Hulu (2), Kab.

Ketapang (12),

Kab. Kayong Utara (12), K

ab. Mempawah (12),

Kab. Sekadau (3), PHD (1).

Perjalanan Haji Sudah Selesai Sampai Ke Tanah Air Dengan Selamat Untuk Semua Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Yang Pulang Terakhir Pada Hari Minggu Tanggal 21 Juni 2026 Dengan Jumlah Jama'ah Haji Keseluruhan 1846 Orang Yang Telah Menunaikan Haji Semoga Menjadi Haji Yang Mabruur.

3. Pada Kegiatan Kedatangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	173.920.700,-	109.691.495,-	63 %

Sumber data : SIPD

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2026 sebesar Rp. 173.920.700,- dan pada Triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 109.691.495,- (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 63 %. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	2 Laporan	50 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 2 (dua) laporan atau sebanyak 50 % (dua puluh lima) persen.

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

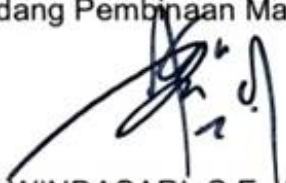
- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

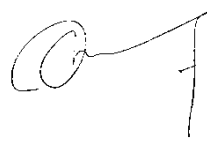
Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2026, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19820814 200604 2 009

Pontianak, 30 Juni 2026
Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,


IMAM ASROPI, SKM, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19710913 199403 1 005

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN





SURAT PERINTAH TUGAS

NO	SPT	HARI/ WAKTU	GIAT	PERSONIL			LOKASI
1	No. 300.1 / 535 / SATPOLPP-B Tanggal 6 April 2026	Kamis, 2 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa BEM-SI Di Taman Digulis Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1 / 536 / SATPOLPP-B Tanggal 6 April 2026	Jumat, 3 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Menjelang Perayaan Paskah Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak
3	No. 300.1 / 538 / SATPOLPP-B Tanggal 6 April 2026	Minggu, 5 April 2026	Kegiatan Silaturahmi Idul Fitri 1447 H Keluarga Besar Muhammadiyah Kalimantan Barat Di Universitas Muhammadiyah Pontianak.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
4	No. 300.1 / 547 / SATPOLPP-B Tanggal 6 April 2026	Senin, 6 April 2026	Kegiatan Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
5	No. 300.1 / 573 / SATPOLPP-B Tanggal 10 April 2026	Sabtu, 11 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Halal Bi Halal Forum Silaturahmi Pemuda Ketapang Serantau Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.				
6	No. 300.1 / 607 / SATPOLPP-B Tanggal 15 April 2026	Jumat, 17 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Paskah Betang Raya Pegawai Dayak Kalimantan Barat Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
7	No. 300.1 / 616 / SATPOLPP-B Tanggal 16 April 2026	Kamis, 16 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Karhutla Di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
8	No. 300.1 / 615 / SATPOLPP-B Tanggal 16 April 2026	Jumat, 17 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Solmadapar Di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.				
9	No. 300.1 / 626 / SATPOLPP-B Tanggal 17 April 2026	Sabtu, 18 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan PW BKMT Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
10	No. 300.1 / 627 / SATPOLPP-B Tanggal 17 April 2026	Minggu, 19 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Halal Bil Halal dan Tabligh akbar MABMKB Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
11	No. 300.1 / 646 / SATPOLPP-B Tanggal 21 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Naik Dango Ke- 3 Di Rumah Radank Pontianak.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

12	No. 300.1 / 647 / SATPOLPP-B Tanggal 21 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
13	No. 300.1 / 675 / SATPOLPP-B Tanggal 24 April 2026	Senin, 27 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Fomda Kalbar Di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	11	Orang	Kota Pontianak
14	No. 300.1 / 673 / SATPOLPP-B Tanggal 24 April 2026	Sabtu, 25 April 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak	SATPOL PP	14	Orang	Kota Pontianak
15	No. 300.1 / 674 / SATPOLPP-B Tanggal 24 April 2026	Minggu, 26 April 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak

			Trantibum Di Kota Pontianak				
16	No. 300.1 / 702 / SATPOLPP-B Tanggal 29 April 2026	Rabu, 29 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Pembekalan Menjelang Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026 Di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
17	No. 300.1 / 703 / SATPOLPP-B Tanggal 29 April 2026	Rabu, 29 April 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
18	No. 300.1 / 716 / SATPOLPP-B Tanggal 30 April 2026	Jumat, 1 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Sentral Perjuangan Rakyat Kalbar (SPARKA) di Halaman Kantor	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak

			Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.				
19	No. 300.1 / 718 / SATPOLPP-B Tanggal 30 April 2026	Sabtu, 2 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Persiapan Keberangkatan Jemaah Haji Di Asrama Haji Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
20	No. 300.1 / 730 / SATPOLPP-B Tanggal 4 Mei 2026	Selasa - Sabtu, 5 Mei - 9 Mei 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kalbar 1447 H di Asrama Haji Pontianak	SATPOL PP	48	Orang	Kota Pontianak
21	No. 300.1 / 766 / SATPOLPP-B Tanggal 8 Mei 2026	Minggu, 10 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Di Pontianak	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak
22	No. 300.1 / 767 / SATPOLPP-B Tanggal 8 Mei 2026	Senin, 11 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak

			Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Dalam Pertemuan bersama Kepala Regional BGN Kalbar beserta seluruh Korwil (Koordinator Wilayah) BGN Se-Kalbar Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat				
23	No. 300.1 / 817 / SATPOLPP Tanggal 19 Mei 2026	Selasa, 19 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (DIKLATDA) dan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Prov. Kalbar di Hotel Alimoer.	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya
24	No. 300.1 / 818 / SATPOL.PP-B Tanggal 19 Mei 2026	Selasa, 19 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Welcome Dinner Pekan Gawai Dayak XL di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

25	No. 300.1 / 830 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Mei 2026	Rabu, 20 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pembukaan Pekan Gawai Dayak Ke-40 Tahun 2026 di Rumah Radangk Kalimantan Barat	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
26	No. 300.1 / 842 / SATPOLPP-B Tanggal 22 Mei 2026	Sabtu, 23 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Oleh Perbakin di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
27	No. 300.1 / 847 / SATPOLPP-B Tanggal 22 Mei 2026	Minggu, 24 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Diesnatalis SMAN 04 Pontianak di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
28	No. 300.1 / 864 / SATPOLPP-B Tanggal 25 Mei 2026	Rabu, 27 Mei 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

			Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Shalat Idul Adha di Kota Pontianak.				
29	No. 300.1 / 878 / SATPOLPP-B Tanggal 29 Mei 2026	Senin, 1 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
30	No. 300.1 / 889 / SATPOLPP-B Tanggal 02 Juni 2026	Selasa, 2 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pembukaan RAKERDA Dekranasda se – Kalbar 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
31	No. 300.1 / 899 / SATPOLPP-B Tanggal 03 Juni 2026	Rabu, 3 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada RAKERDA Dekranasda se – Kalbar 2026 di	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

			Pendopo Gubernur Kalimantan Barat				
32	No. 300.1 / 900 / SATPOLPP-B Tanggal 03 Juni 2026	Rabu, 3 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Audiensi oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Kantor Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
33	No. 300.1 / 908 / SATPOLPP-B Tanggal 03 Juni 2026	Kamis, 4 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur di Kota Pontianak.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
34	No. 300.1 / 940 / SATPOLPP-B Tanggal 09 Juni 2026	Selasa, 9 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Workshop Kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Organisasi (OKK) ke 5 PWI Kalbar Tahun 2026 di Aula Politeknik Negeri Pontianak.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

35	No. 300.1 / 952 / SATPOLPP-B Tanggal 10 Juni 2026	Rabu, 10 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pelajar Yang Bolos Pada Jam Sekolah di Kota Pontianak	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
36	No. 300.1 / 963 / SATPOLPP-B Tanggal 11 Juni 2026	Kamis, 11 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pembukaan RAKERNAS XVI ARSADA 2026 di Hotel Novotel Pontianak.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
37	No. 300.1 / 964 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Juni 2026	Jumat, 12 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
38	No. 300.1 / 977 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Juni 2026	16-19, Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan	SATPOL PP	29	Orang	Kota Pontianak

			Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jemaah Haji Kalbar 1447 H di Asrama Haji Pontianak.				
39	No. 300.1 / 978 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Juni 2026	20-21, Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jemaah Haji Kalbar 1447 H di Asrama Haji Pontianak	SATPOL PP	18	Orang	Kota Pontianak
40	No. 300.1 / 1112 / SATPOLPP-B Tanggal 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
41	No. 300.1 / 1120 / SATPOLPP-B Tanggal 19 Juni 2026	Senin, 22 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Audiensi Oleh Ormas dan Tokoh Adat Kec Sungai Laur di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak

42	No. 300.1 / 1147 / SATPOLPP-B Tanggal 25 Juni 2026	Kamis, 25 Juni 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Penandatanganan MoU Beasiswa Pendidikan Internasional bersama Ketua Komisi II DPR RI di SMA N 1 Pontianak.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
----	---	------------------------	--	-----------	---	-------	----------------